



## Analisis Sektor Pembiayaan dalam Mendorong Suatu Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Isri Al Iqna Saputri<sup>1</sup>, Devita Riani<sup>2</sup>, Maulitha Haliza Syaharani<sup>3</sup>, Pradipta Larasati Annisa Aulia Hapsari<sup>4</sup>, Nabila Nurailida<sup>5</sup>, Siti Aisyah<sup>6</sup>, I ketut Astawa<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstrak

Received: 20 Juni 2025  
Revised: 27 Juni 2025  
Accepted: 01 Juli 2025

*UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional, namun pertumbuhannya seringkali terhambat oleh berbagai kendala, terutama dalam akses terhadap pembiayaan dari sektor formal seperti perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan mencakup keterbatasan informasi, kurangnya literasi keuangan, persyaratan yang ketat, serta minimnya jaminan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh akses sektor pembiayaan terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat aksesibilitas UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi sejauh mana sektor pembiayaan dapat mendorong pertumbuhan UMKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM.*

**Keywords:** Sektor Pembiayaan, UMKM, Hambatan Pembiayaan.

(\*) Corresponding Author: [isrialiqnaasr@gmail.com](mailto:isrialiqnaasr@gmail.com)

**How to Cite:** Saputri, I. A., Riani, D., Syaharani, M., Hapsari, P. L. A., Nurailida, N., Aisyah, S., & Astawa, I. (2025). Analysis of the Financing Sector in Encouraging the Growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.D), 123-129. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10680>.

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian global, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. UMKM tidak hanya berperan sebagai penopang ekonomi lokal tetapi juga menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2020 yang di kutip dari Junaidi (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan berkontribusi dalam penyediaan lebih dari 90% lapangan kerja. Dengan kontribusi ini, UMKM menjadi sektor yang strategis dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah perannya yang sangat signifikan, sektor UMKM juga berhadapan dengan berbagai kendala yang dapat menghambat potensi pertumbuhannya. Salah satu kendala utama yang sering kali di hadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Akses terhadap pembiayaan merupakan aspek yang sangat vital dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Dengan pembiayaan yang memadai, UMKM dapat memenuhi kebutuhan modal kerja, berinvestasi dalam aset tetap, serta

mengembangkan inovasi produk dan memperluas jaringan pasar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak UMKM, terutama di negara-negara berkembang, kesulitan untuk mengakses sumber pembiayaan dari sektor formal seperti perbankan dan lembaga keuangan *non-bank*. Beck et al. (2008) mencatat bahwa kurangnya akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu hambatan terbesar bagi perkembangan UMKM di seluruh dunia. Masalah ini semakin terlihat di negara-negara seperti Indonesia, di mana sebagian besar UMKM beroperasi dalam skala kecil dan sering kali berada di luar jangkauan lembaga keuangan formal.

Akses terhadap pembiayaan formal dari perbankan dan lembaga keuangan *non-bank* menjadi salah satu jalan yang potensial untuk mengatasi keterbatasan modal yang di hadapi oleh UMKM. Pembiayaan, seperti kredit usaha, pinjaman modal kerja, dan fasilitas pembiayaan lainnya, dapat memberikan suntikan dana yang di perlukan UMKM untuk melakukan investasi, memperbarui teknologi, serta meningkatkan kapasitas usaha mereka. Dalam banyak kasus, pembiayaan dari sektor keuangan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha, terutama bagi UMKM yang memiliki prospek bisnis yang baik namun terkendala oleh keterbatasan sumber daya finansial. Namun, realitas menunjukkan bahwa akses UMKM terhadap pembiayaan masih sangat terbatas. Meskipun pemerintah dan sektor perbankan telah berupaya memperluas akses pembiayaan melalui berbagai program, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya, banyak UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan survei, hanya sebagian kecil UMKM yang berhasil mendapatkan akses ke pembiayaan formal. Sebagian besar pelaku UMKM lebih mengandalkan sumber pembiayaan informal, seperti pinjaman dari keluarga, teman, atau lembaga keuangan mikro dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi. Ada sejumlah hambatan yang menyebabkan rendahnya akses UMKM terhadap pembiayaan formal. Salah satu tantangan utama dalam akses pembiayaan bagi UMKM adalah status "belum *bankable*." Status ini mengacu pada kondisi di mana UMKM tidak memenuhi kriteria yang di perlukan untuk mendapatkan layanan pembiayaan dari lembaga keuangan formal, terutama bank. Banyak UMKM di Indonesia tidak memiliki laporan keuangan yang teratur, tidak memiliki jaminan yang cukup, atau tidak memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Berger & Udell (2006) menunjukkan bahwa hambatan ini sering kali menyebabkan lembaga keuangan melihat UMKM sebagai entitas dengan risiko tinggi, sehingga enggan untuk memberikan kredit. Akibatnya, UMKM kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan yang di butuhkan untuk mendukung pertumbuhannya. Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM semakin memperburuk situasi ini. Banyak pengusaha kecil yang tidak memahami prosedur pengajuan kredit, tidak mengetahui opsi pembiayaan yang tersedia, atau tidak mampu mengelola keuangan usaha mereka dengan baik (Hapsari et al., 2017). Prosedur birokrasi yang rumit dan persyaratan yang ketat juga menjadi salah satu penghambat akses pembiayaan bagi UMKM. Proses pengajuan pembiayaan di sektor perbankan formal seringkali melibatkan syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh UMKM, seperti penyediaan laporan keuangan yang lengkap, sertifikasi usaha, dan jaminan aset. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk memproses pengajuan kredit seringkali lama, sementara banyak UMKM membutuhkan pembiayaan

dengan segera untuk mendukung operasional harian mereka. Riyanto et al. (2017) menunjukkan bahwa prosedur yang rumit dan waktu proses yang panjang ini menyebabkan banyak UMKM, terutama yang beroperasi di daerah pedesaan atau yang baru memulai usaha, enggan untuk mengajukan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Ditambah lagi, suku bunga yang tinggi seringkali menjadi hambatan lain bagi UMKM yang memiliki kemampuan keuangan yang terbatas.

Dengan berbagai hambatan tersebut, penting untuk memahami bagaimana akses sektor pembiayaan dapat mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Studi yang ada menunjukkan bahwa UMKM yang berhasil mendapatkan akses pembiayaan formal cenderung mengalami peningkatan dalam skala produksi, pengembangan inovasi, dan peningkatan produktivitas. Pembiayaan yang memadai memungkinkan UMKM untuk memodernisasi proses produksi, meningkatkan kualitas produk, dan lebih kompetitif di pasar, baik di tingkat lokal maupun internasional. Selain itu, akses pembiayaan juga membantu UMKM dalam menghadapi tantangan likuiditas dan mempertahankan operasional usaha mereka, terutama di masa-masa sulit seperti krisis ekonomi atau pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pengaruh akses sektor pembiayaan terhadap pertumbuhan UMKM, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan dari sektor formal, seperti perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembiayaan UMKM di Indonesia dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengambil kebijakan, sektor perbankan, serta pelaku UMKM untuk mendorong akses pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi sektor UMKM di Indonesia.

## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif yang dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengaruh akses pembiayaan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta hambatan yang dihadapi dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara detail (deskriptif) sekaligus memahami makna yang terkandung di balik pengalaman dan persepsi pelaku UMKM (interpretatif) (Pratama & Apriani, 2023). Sugiyono (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis karakteristik fenomena yang terjadi secara alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif karena dimulai dengan fakta, menggunakan teori yang ada sebagai kerangka penjelasan, dan diakhiri dengan pengembangan teori. Bungin (2003), menjelaskan bahwa analisis isi adalah suatu teknik analisis yang bersifat integratif dan konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis teks untuk memahami makna, kepentingan, dan relevansinya (S et al., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak aksesibilitas keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan UMKM dalam memperoleh pendanaan formal.

## **HASIL & PENELITIAN**

### **Pengaruh Akses Sektor Pembiayaan terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Akses sektor pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Meski UMKM berkontribusi 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja, namun sekitar 60-70% UMKM masih kesulitan mendapatkan akses pembiayaan. Kendala seperti kurangnya pengetahuan keuangan dan kriteria pinjaman yang ketat menghambat akses ini. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM, terutama untuk mendorong pertumbuhan dan meringankan kemiskinan.

Akses terhadap sektor pembiayaan memegang peranan penting dalam pertumbuhan UMKM, dampaknya mencakup beberapa aspek utama:

#### 1) Peningkatan Modal Kerja

UMKM seringkali kesulitan mengakses modal yang cukup untuk operasional dan ekspansi. Dengan akses pembiayaan yang lebih baik, mereka dapat mengumpulkan dana untuk membeli inventaris, bahan baku, atau meningkatkan kapasitas produksi. Modal yang cukup membantu UMKM berkembang lebih cepat dan meningkatkan daya saingnya.

#### 2) Kemampuan Ekspansi dan Diversifikasi

Pembiayaan memberikan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat berupa pembukaan cabang baru, pengembangan produk, atau akses ke pasar yang lebih besar, termasuk pasar internasional. Kemampuan untuk melakukan ekspansi akan meningkatkan pendapatan dan skala ekonomi.

#### 3) Peningkatan Inovasi

UMKM yang memiliki akses terhadap pembiayaan cenderung lebih mampu berinvestasi pada penelitian dan pengembangan. Inovasi di bidang produk, layanan, atau proses bisnis menjadi lebih mungkin dilakukan karena mereka memiliki dana yang cukup untuk bereksperimen dan beradaptasi dengan perubahan pasar.

#### 4) Stabilitas Keuangan

Akses terhadap pembiayaan formal memungkinkan UMKM menjaga stabilitas keuangan dengan meminimalkan risiko ketidakstabilan arus kas. Dengan stabilitas ini, mereka dapat bertahan dari tantangan pasar yang tidak terduga seperti krisis ekonomi atau penurunan permintaan musiman.

#### 5) Peningkatan Daya Saing

Dengan dukungan permodalan dan pembiayaan yang kuat, UMKM dapat meningkatkan daya saingnya, baik di pasar lokal maupun internasional. Mereka mampu memanfaatkan peluang bisnis yang sebelumnya sulit dijangkau tanpa dukungan finansial yang memadai.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, antara lain:

- 1) Kredit Usaha Rakyat (KUR): Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi UMKM dengan syarat lebih ringan dibandingkan pinjaman bank konvensional.

- 2) Lembaga Keuangan Mikro (LKM): LKM berfungsi sebagai alternatif bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan dengan jangka waktu lebih fleksibel dan fokus pada pengembangan masyarakat.

### **Hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam Mengakses Pembiayaan dari Sektor Formal seperti Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank**

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pengembangan kewirausahaan skala kecil yang sering disebut dengan usaha kecil (UKM). Peran UMKM dapat dilihat sebagai penyelamat dalam proses pemulihan perekonomian negara, baik dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi maupun lapangan kerja. Krisis ini membawa perubahan posisi para pelaku ekonomi. Lambat laun perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan karena bahan baku impor meningkat secara signifikan dan biaya pembayaran utang meningkat akibat depresiasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sektor perbankan juga mengalami penurunan, dan situasi permodalan di sektor industri juga memburuk. Suku bunga yang tinggi membuat banyak perusahaan tidak mungkin terus beroperasi. Berbeda dengan usaha kecil, sebagian besar usaha tersebut dapat bertahan dan bahkan cenderung berkembang. Permasalahan utama yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah masalah utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah Keterbatasan akses permodalan mungkin dialami untuk pengembangan usaha, terutama karena masalah jaminan yang belum memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan, kurangnya dokumen legal seperti nomor wajib pajak (NPWP), atau tata administrasi keuangan yang belum terorganisir dengan baik dan tepat. Hal tersebut mengakibatkan UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan diri serta bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar di pasar. Berkembangnya sektor UKM ini berarti terdapat potensi kekuatan dalam negeri yang besar. Jika kita bisa mengelola dan mengembangkan ini dengan baik, kita pasti akan mampu menciptakan usaha kecil dan menengah yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan usaha kecil dan menengah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun hingga saat ini, usaha kecil dan menengah masih menghadapi permasalahan mendasar seperti: Kurangnya sumber daya dari lembaga keuangan formal, khususnya bank, menyebabkan ketergantungan pada sumber-sumber informal.

Ada beberapa bentuk sumber-sumber keuangan yang beragam, mulai dari pelepasan uang hingga berkembang Unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk lainnya sering disebut dengan lembaga keuangan mikro (LKM). Dalam proses perkembangannya, lembaga keuangan mikro ini menjadi semakin populer di kalangan usaha kecil dan menengah karena persyaratan dan fleksibilitasnya yang tidak terlalu ketat dibandingkan bank tradisional, dan sifatnya yang lebih fleksibel, seperti syarat dan jumlah pinjaman dalam pencairan kredit. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro ada sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM yang biasanya memerlukan pembiayaan sesuai dengan skala dan jenis usaha kecil. Keberadaan lembaga keuangan mikro bagi UKM sangat penting, sehingga jumlah LKM terus berkembang pesat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah unit maupun jumlah nasabah di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kurangnya pengembangan usaha,

terutama karena masalah agunan, persyaratan pengajuan pinjaman yang tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi, kurangnya legalitas formal dan nomor identifikasi pajak, dll. Akses terhadap modal terbatas (NPWP) atau pengelolaan keuangan tidak terorganisir dengan baik dan benar. Situasi ini membuat UMKM sulit berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar di pasar. UMKM sering menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pembiayaan dari sektor formal, seperti:

- 1) Kurangnya Jaminan: Banyak UMKM tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan, sehingga bank merasa risiko tinggi.
- 2) Dokumen dan Administrasi: Proses pengajuan pinjaman sering kali rumit dan memerlukan dokumen yang tidak mudah dipenuhi oleh UMKM.
- 3) Riwayat Kredit yang Minim: UMKM seringkali memiliki riwayat kredit yang kurang, sehingga bank enggan memberikan pembiayaan.
- 4) Keterbatasan Pengetahuan Keuangan: Pemilik UMKM mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pengelolaan keuangan dan cara mengajukan pinjaman.
- 5) Kondisi Pasar yang Tidak Stabil: Ketidakpastian ekonomi dapat membuat lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMKM.
- 6) Persyaratan yang Ketat: Banyak bank menerapkan persyaratan yang ketat untuk memberikan pinjaman, yang bisa jadi sulit dipenuhi oleh UMKM.
- 7) Kurangnya Akses Informasi: UMKM mungkin tidak tahu tentang produk pembiayaan yang tersedia atau cara mengaksesnya.
- 8) Biaya Pembiayaan yang Tinggi: Suku bunga yang tinggi atau biaya lain dapat menjadi penghalang bagi UMKM untuk meminjam.

Dalam Mengatasi hambatan ini maka diperlukan upaya antara pemerintah, lembaga keuangan, dan UMKM itu sendiri. Persoalan disintermediasi perbankan, khususnya bagi UMKM, pada dasarnya erat kaitannya dengan profil debitur UMKM yang sebagian besar tidak mampu melakukan transaksi perbankan atau tidak memenuhi persyaratan untuk bertransaksi perbankan. Unbankability debitur UMKM menyebabkan terabaikannya aspek kelayakan debitur UMKM. Dengan tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan, calon peminjam UMKM kehilangan kesempatan memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Selain anggapan bahwa UMKM tidak memiliki bankable, ada pendapat bahwa disintermediasi perbankan didasarkan pada karakteristik UMKM itu sendiri, dan tipologi UMKM pada umumnya kecil dan tersebar sehingga mengakibatkan biaya atau harga satuan menjadi lebih tinggi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa agunan pada umumnya terbatas dan, dalam beberapa kasus, non-agunan. Hal ini jelas berarti risiko kredit yang lebih tinggi bagi bank. Selain itu, akan jauh lebih menguntungkan bagi bank jika dana yang tersedia tidak mengalir ke perusahaan-perusahaan yang berisiko. Bagaimanapun, bank adalah lembaga ekonomi. Seperti diketahui, bank melakukan berbagai aktivitas dalam setiap operasionalnya sehari-hari yang tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan. Banyak UMKM yang layak mendapatkan dukungan permodalan karena memiliki potensi pengembangan yang besar. Namun, bank sering kali menerapkan peraturan dan prinsip manajemen risiko, yang dapat membuka peluang bisnis.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa akses terhadap sektor pembiayaan formal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM yang berhasil mendapatkan pembiayaan formal cenderung mengalami peningkatan dalam skala produksi, inovasi, dan produktivitas, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal dan internasional. Namun, banyak UMKM menghadapi berbagai kendala dalam mengakses pembiayaan, seperti persyaratan yang ketat, kurangnya jaminan, dan rendahnya literasi keuangan. Suku bunga yang tinggi juga menjadi hambatan signifikan bagi UMKM yang memiliki kemampuan keuangan terbatas. Hal ini menyebabkan banyak UMKM bergantung pada sumber pembiayaan informal, yang dapat mengakibatkan disintermediasi perbankan dan mengabaikan potensi bisnis yang ada.

## REFERENSI

- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2008). Financing patterns around the world: Are small firms different?☆. *Journal of Financial Economics*, 89(3), 467–487. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.10.005>
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). A more complete conceptual framework for SME finance. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2945–2966. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.008>
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Hapsari, K. A., Biagioni, S., Jennerjahn, T. C., Reimer, P. M., Saad, A., Achnopa, Y., Sabiham, S., & Behling, H. (2017). Environmental dynamics and carbon accumulation rate of a tropical peatland in Central Sumatra, Indonesia. *Quaternary Science Reviews*, 169, 173–187. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.05.026>
- Junaidi, M. (2023). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*. DJPB Kemenkeu. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Riyanto, S., Sutrisno, A., & Ali, H. (2017). The Impact of Working Motivation and Working Environment on Employees Performance in Indonesia Stock Exchange. *International Review of Management and Marketing*, 7(3), 342–348. <https://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/5269>
- S, G. N., Hana, F., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.